



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **RUSLI SOFIAN MURWANTO**
2. Jabatan : **KEPALA BAGIAN**
3. NHK : **240468**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **505.000.000**

1. Tanah Seluas 77 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
2. Tanah Seluas 104 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
3. Tanah Seluas 107 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **234.000.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
4. MOBIL, DAIHATSU XENIA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
5. MOTOR, YAMAHA B6H-AI A/T/NMAX Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 33.000.000
6. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
7. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000



8. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
9. MOBIL, DAIHATSU XENIA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 9.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 166.101.338

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 914.101.338

III. HUTANG Rp. 48.909.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 865.192.338

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.